

# HISTORISITAS DAN DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

*Kasron Nasution*

---

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara  
email: [katsronmuhsin@gmail.com](mailto:katsronmuhsin@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to analyze the historicity and dynamics of Islamic education institutions in Indonesia starting from the classical period, colonialism period, and pre- and post-independence periods. This research uses library research method. Data analysis using analytical descriptive analysis techniques. The results of the study show that Islamic education in Indonesia is the same age as the existence of Islam in the archipelago. Broadly speaking, the history of Islamic educational institutions in Indonesia can be divided into three periods. First, the classical period of the 13th - 16th century, namely since the entry of Islam in Indonesia, the establishment of the Islamic empire, the era of the Islamic empire until the entry of colonizers into Indonesia. Several institutions during this period were mosques, Islamic boarding schools, menasah, rangkang and dayah, surau. Second, the colonial period until the independence period (1600 - 1945). At this time it was divided into two, namely during the Dutch colonial period, there were several institutions namely Elementary Education, Latin Schools, Seminarium Theologicum, Academie der Marine, Chinese Schools. During the Japanese occupation there were several institutions, namely Basic Education (Kokumin Gakko), Advanced Education, consisting of Shoto Chu Gakko, Vocational Education, Higher Education. Third, the period of the independence era (1945-present). There are several institutions, namely pesantren, madrasah, schools, PTKI.

**Keywords:** Historical, Dynamics, Islamic Education Institute, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis historisitas dan dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai dari periode klasik, periode kolonialisme, dan periode kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia seumuran dengan eksistensi Islam di Nusantara. Secara garis besar, sejarah lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama, periode klasik abad ke-13 - 16 M yaitu sejak masuknya Islam di Indonesia, berdirinya kerajaan Islam, era kerajaan Islam hingga masuknya penjajah ke Indonesia. Beberapa lembaga pada periode ini masjid, pesantren, menasah, rangkang dan dayah, surau. Kedua, masa penjajahan sampai masa kemerdekaan (1600 - 1945). Pada masa ini terbagi menjadi dua yakni pada masa penjajahan belanda, terdapat beberapa lembaga yakni Pendidikan Dasar, Sekolah latin, *Seminarium Theologicum*, *Academie der Marine*, Sekolah Cina. Pada penjajahan Jepang terdapat beberapa lembaga yakni Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*), Pendidikan Lanjutan, terdiri dari *Shoto Chu Gakko*, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Tinggi. Ketiga, periode era kemerdekaan (1945-sekarang). Terdapat beberapa lembaga yakni pesantren, madrasah, sekolah, PTKI.

**Kata Kunci:** Historisitas, Dinamika, Lembaga Pendidikan Islam, Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu usaha membentuk manusia agar memiliki peradaban. Pendidikan memegang peranan paling mendasar dan strategis sebagai usaha menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Agama Islam telah mewajibkan umatnya agar melaksanakan pendidikan. Pendidikan dapat terlaksana apabila terpenuhinya aspek-aspek pendidikan, di antaranya adalah aspek lembaga pendidikan. (Harahap, 2019).

Lembaga pendidikan Islam merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam guna menanamkan nilai-nilai agama, sains dan budaya agar tetap lestari dan dapat mengangkat derajat dan martabat kehidupan manusia. Para ahli sejarah pendidikan berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan lembaga pendidikan Islam. (Bafadhol, 2017).

Membicarakan sejarah lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, adalah suatu persoalan yang sangat menarik. Hal ini disebabkan oleh empat faktor, antara lain: (1) lembaga pendidikan merupakan sarana strategis bagi peroses terjadinya transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas sosial. (2) Pelacakan eksistensi lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam di Indonesia. (3) kemunculan lembaga pendidikan Islam dalam sebuah komunitas tidak mengalami ruang hampa, tetapi senantiasa dinamis, baik dari fungsi maupun pembelajarannya. (4) kehadiran lembaga pendidikan Islam telah

memberikan spektrum tersendiri dalam membuka wawasan dan dinamika intelektual umat Islam. (5) Lembaga pendidikan Islam telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Berbicara tentang lembaga pendidikan Islam, maka tidak bisa dipisahkan dengan sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia sama usianya dengan eksistensi agama Islam di kepulauan nusantara.

Secara garis besar sejarah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. dapat dibagi kepada tiga priode Pertama, periode klasik abad 13 M. – 16 M., yaitu sejak mulai masuknya Islam di Indonesia, berdiri kerajaan Islam, zaman kerajaan Islam sampai masuknya kolonialis ke Indonesia. Kedua, Periode konialisme sampai zaman kemerdekaan (1600 - 1945). Ketiga, Periode zaman kemerdekaan (1945-sekarang). (Daulay & Tobroni, 2017).

Tulisan ini bertujuan untuk membahas ketiga hal tersebut, yakni sejarah dan perkembangan lembaga pendidikan Islam pada periode klasik, pada periode kolonialisme, dan periode orde baru. Tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi pengantar sejarah lembaga pendidikan Islam di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Dimana buku-buku, dan jurnal yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan

teknik analisis konten. Dimana peneliti menganalisis isi dari data yang dirujuk, Kemudian memberikan interpretasi terhadap temuan data yang diperoleh tersebut, tanpa bersifat subjektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Pendidikan Islam Periode Klasik**

Mengkaji pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di masa ini, tidak dapat dipisahkan dengan mengkaji awal datangnya Islam di Indonesia. Ilmuwan sejarah menggunakan teori yang berbeda dalam memprediksi awal masuknya Islam dan dengan alasan yang berbeda pula. Teori-teori tersebut didasarkan pada kontak dagang antara dunia Arab dengan dunia Timur (Asia Tenggara). Diperkirakan kontak dagang tersebut sudah berlangsung sejak abad ke 7 H (13 M). (Daulay, 2019).

Sangat sulit dipastikan di mana Islam pertama sekali masuk. Ada yang mengatakan di Jawa, dan ada yang mengatakan di Sumatera Utara lebih tepatnya di pantai Barus wilayah Sibolga Tapanuli Tengah. Namun demikian ahli sejarah sependapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pesisir sumatera (Indonesia bagian barat/Aceh). Para pedagang Islam transit di pesisir pantai sumatera untuk beberapa lama guna menurunkan muatan, mengisi kapal dengan barang lokal kemudian berlayar. Rutinitas demikian, berlangsung terus menerus sehingga membentuk komunitas muslim dan suatu pemukiman. Di mana pada masa awal, saudagar-saudagar

muslim, mullah (ulama) secara simultan mampu memperkenalkan nilai-nilai Islam terutama tentang hukum Islam mengenai perdagangan. Tentang siapa pribadi/orang yang membawa agama Islam, tentu tidak dapat diidentifikasi namanya secara jelas. (Maghfuri & Rasmuin, 2019).

Dari Komunitas Muslim inilah lama-kelamaan muncul kerajaan Islam, maka raja mengangkat ulama sebagai penasihat dan mendudukkan ulama pada posisi terhormat. Contoh, Syekh Samsuddin as-Sumatrani dan Syekh Nuruddin ar-Raniry adalah ulama yang diangkat menjadi mufti pada kerajaan Aceh Darussalam. (Yatim, 2016). Demikian juga para Walisongo sangat besar peranannya dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, di antaranya adalah Kerajaan Islam Demak. Kedudukan yang strategis pada pusat kekuasaan memudahkan para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu cara ulama dalam menyebarkan agama Islam adalah mendirikan lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat mendidik ulama, dan setelah ulama tersebut tamat, maka kembali ke daerahnya dan mendirikan pesantren pula.

Berdasarkan pendapat Haidar, ada beberapa jenis lembaga pendidikan Islam periode klasik di Indonesia. (Daulay, 2018).

*Pertama*, Masjid, Kata "Masjid" menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, berarti: tempat shalat. (Yunus, 1995). Masjid, fungsi utamanya adalah untuk

tempat shalat fardhu, ditambah shalat Jumat sepekan sekali juga sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan ke-Islaman lainnya. Selain masjid ada juga tempat ibadah lain yang disebut mushalla yang berarti tempat shalat. Mushalla disebut juga Langgar (bahasa Jawa) ataupun Surau (bahasa Minang) yang berarti masjid kecil. Selain dari fungsinya, masjid dan langgar juga berfungsi sebagai tempat pendidikan. Ilmu-ilmu ke-Islaman baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

*Kedua*, Pesantren, berdasarkan pengamatan sejarah, belum ditemukan data, kapan pertama sekali pesantren didirikan. Diperkirakan, pesantren pertama sekali muncul di Jawa, didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal Syaikh Maulana Maghribi (w. 12 Rabiul awal 822 H/ 8 April 1419 M). Sebelum Islam datang telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang melaksanakan praktek pengajarannya sama dengan model pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama *Pawiyatan*, di lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dengan Cantrik. Ki Ajar orang yang mengajar dan Cantrik orang yang diajar. Fungsi utama lembaga pesantren adalah mentransfer ilmu-ilmu agama dan membina sikap beragama warganya. Pada tingkat dasar anak didik diajar mengenal dasar-dasar agama dan al-Quranul Karim. Setelah berlangsung beberapa lama dan santri telah menguasai kecerdasan tertentu, maka mulailah diajarkan kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan kepada dasar, menengah dan tinggi.

Pada masa kaum penjajah (kolonial) berkuasa, peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kokoh. Lembaga pendidikan Pesantren sangat kontras sekali dengan pendidikan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh Belanda. Pesantren hanya semata-mata mengajarkan agama lewat kitab-kitab klasik, sedangkan sekolah Belanda sama sekali tidak mengajarkan agama, dengan menerapkan budaya Barat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang reaksional terhadap penjajah.

*Ketiga*, Menasah, Rangkang dan Dayah. Secara Etimologi, "*Meunasah*" berasal dari kata "*Madrasah*". Bagi masyarakat Aceh meunasah tidak semata-mata tempat belajar, tetapi memiliki berbagai fungsi. Sebagai mana masjid, maka fungsi meunasah adalah sama ditambah sebagai tempat menginap malam hari bagi anak laki-laki dewasa, juga bagi musafir yang kemalaman. Sedang fungsi pendidikannya, meunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan pendidikan tingkat dasar. Di meunasah para murid diajar menulis dan membaca huruf Arab dan ilmu agama dalam bahasa Jawi (Melayu), dan pelajaran akhlak. (Hasjmy, 1983). Rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Di samping itu juga dipakai sebagai tempat belajar. Sistem pendidikan di rangkang sama dengan di pesantren. Murid duduk membentuk halaqah dan si guru menerangkan pelajaran.

Selanjutnya Lembaga pendidikan berikutnya yang populer di Aceh adalah "Dayah". Dayah berasal dari bahasa Arab "Zawiyah" yang berarti satu sudut ruangan di masjid yang dijadikan sebagai tempat belajar agama. Lebih lanjut Hasymi menjelaskan, dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab, misalnya fiqh, bahasa Arab, tauhid, tasawuf dan lain-lain. Tingkat pendidikan dayah adalah sama dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

*Keempat*, Surau yang merupakan lembaga Pendidikan Islam tradisional di Sumatera Barat disebut "Surau". Istilah surau telah digunakan sebelum datangnya Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, surau diartikan tempat umat Islam melakukan ibadahnya (sembahyang, mengaji dan sebagainya). Di Sumatera barat, pengertian surau tidak hanya terbatas untuk tempat belajar agama, tetapi juga berfungsi sebagai tempat mensosialisasikan budaya.

Christine Dobbin memberikan pengertian bahwa surau adalah rumah yang didiami oleh pemuda setelah aqil baligh, terpisah dari rumah keluarganya yang menjadi tempat tinggal wanita dan anak-anak. (Dobbin, 1992). Surau pertama sekali dibangun oleh Raja Adityawarman di sekitar bukit Gombak untuk tempat ibadah orang-orang Hindu- Budha. Setelah Islam masuk ke Minang Kabau, surau mengalami proses Islamisasi memiliki fungsi lebih luas lagi yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam. Surau yang

pertama kali dianggap sebagai lembaga pendidikan adalah surau yang didirikan oleh Syeikh Burhanuddin (1646-1691), murid syekh Abdurrauf bin Ali. (Yunus, 1995). Dari segi besar kecilnya surau, dibagi kepada tiga kategori kategori yaitu: pertama, surau kecil memuat sekitar 20 pelajar digunakan untuk tempat mengaji al-Quran dan salat lima waktu. Kedua, surau menengah berisi 80 pelajar, dan surau besar 100-1000 pelajar tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengaji dan shalat tetapi mempunyai fungsi yang lebih luas yaitu pendidikan yang lebih sistematis. Surau-surau tersebut juga memiliki kekhususannya masing-masing. Ada surau yang khusus mengkaji ilmu alat, seperti surau Kamang, khusus mengkaji ilmu mantiq, ma'ani, yaitu surau Koto Gedang dan surau khusus mengkaji ilmu tafsir dan faraid adalah surau Sumanik, sedang surau yang mengkaji ilmu nahwu adalah surau Talang

Lembaga pendidikan tersebut di atas merupakan lembaga pendidikan Islam yang diakui sangat besar peranannya untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman bahkan dalam mencetak intelektual muslim nusantara.

### **Lembaga Pendidikan Islam Periode Kolonialisme**

Indonesia termasuk negara yang dijajah oleh beberapa negara, oleh karena itu pembahasannya didasarkan hal tersebut:

1. Masa Kolonial (VOC dan Kerajaan Belanda)

Pendidikan masa kolonial dapat dipetakan ke dalam 2 (dua) periode besar,

yaitu pada masa berperannya VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*) dan masa pemerintah Hindia Belanda (*Nederlands Indiesh*). Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial VOC. Kondisi pendidikan di zaman VOC juga tidak melebihi perkembangan pendidikan di zaman Portugis atau Spanyol. Pendidikan diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC dan keluarganya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah terlatih dari kalangan penduduk pribumi. VOC memang mendirikan sekolah-sekolah baru selain mengambil alih lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja Katholik Roma. Sebagai bahan perbandingan antara lembaga pendidikan yang dibentuk VOC dan perhatiannya terhadap lembaga pendidikan Islam, maka secara umum sistem pendidikan pada masa VOC adalah sebagai berikut:

Menurut S. Nasution, sekolah pertama sekali didirikan di Ambon pada tahun 1607, untuk anak-anak Indonesia, karena pada waktu itu belum ada anak Belanda. Tujuan utama sekolah ini adalah untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, Calvinisme. (Nasution, 1983). Sekolah pertama di Jakarta dibuka pada tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Pada tahun 1636 jumlahnya

menjadi 3 buah dan pada tahun 1706 telah ada 34 guru dan 4837 murid. Sekolah-sekolah ini terbuka bagi semua anak tanpa perbedaan kebangsaan. Membagi kepada kelas-kelas, dan hanya mengajarkan agama kristen protestan. Lebih jelasnya sistem pendidikan masa VOC adalah sebagai berikut (Daulay, 2001):

- Pendidikan Dasar

Berdasarkan peraturan tahun 1778, pendidikan dasar dibagi kedalam 3 kelas berdasar rankingnya. Kelas 1 (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3 (terendah) materi pelajaran fokus pada alfabet dan mengeja kata-kata. Contoh pendidikan dasar ini antara lain *Batavische school* (Sekolah Betawi, berdiri tahun 1622); *Burgerschool* (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630) dll

- Sekolah Latin

Diawali dengan sistem numpang-tinggal (*in de kost*) di rumah pendeta tahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Latin.

- *Seminarium Theologicum* (Sekolah Seminari)

Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta.

- *Academie der Marine* (Akademi Pelayaran) Berdiri tahun 1743.

- Sekolah Cina didirikan tahun 1737, untuk keturunan Cina yang miskin.

Pada tahun 1900-1920 timbul kesadaran bangsa Belanda untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dan menentang politik eksploitasi materialis yang dikenal sebagai *Politik Etis* dikemukakan oleh Van Deventer. Menurut S. Nasution: Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dari pulau Jawa yang terlampaui padat penduduknya. Akan tetapi semua usaha perbaikan akan sia-sia tanpa pendidikan massa. Pendidikan dan emansipasi bangsa secara berangsur-angsur itulah inti Politik Etis. Sekolah rendah meningkat cepat, sekolah-sekolah berorientasi Barat diciptakan baik bagi orang Cina maupun orang Indonesia. Pendidikan juga berkembang secara vertikal dengan didirikannya *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Algemene Middelbare School* (AMS) yang lebih terbuka bagi anak-anak Indonesia daripada *Hogere Burger School* (HBS) bagi anak Belanda untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas.

Namun, Politik Etis tidak berlangsung lama, melainkan hanya dua dekade. Walaupun seluruh pemerintah Belanda dan partai-partai politik, liberal maupun konservatif, sepakat tentang kewajiban moral mereka di Indonesia, Politik Etis yang murni sesungguhnya hanya dilaksanakan oleh segelintir orang. Van Kol mengeluh bahwa: “sesungguhnya

tidak ada apa yang disebut politik Etis di tanah jajahan, karena tujuan politik kolonial ialah *eksploitasi bangsa yang terbelakang*, walaupun sebenarnya sering disembunyikan di belakang kata-kata indah”.

Pada awal abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, Indonesia akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda (1816). Berbeda pada masa VOC, Kerajaan Belanda mulai memberikan perhatian sedikit lebih serius.

Beberapa prinsip pemerintah Belanda sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain pemerintah Belanda sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain: (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu, (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial, (3) Sistem pendidikan diatur menurut perbedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa, (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia. (Huda, 2015).

Sementara itu dalam bidang pendidikan agama pemerintah Belanda, mempunyai sikap netral terhadap

pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, sesuai dengan pasal 179 (2) I.S (*Indische Staatsregeling*), dan dalam beberapa ordonansi yang secara singkat bunyinya sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran Agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah.

Namun usaha VOC dan Kerajaan Belanda dalam usahanya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia maka tidak ada kelihatan upaya Kolonial tersebut untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam. VOC dan kerajaan Belanda, tidak ikut campur mengurus atau mengatur pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam hanya dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Malah alumni Pesantren tidak dapat diterima bekerja di pemerintahan. Pesantren dan sekolah seolah-olah dua lembaga pendidikan yang saling bermusuhan dan bertolak belakang. Berkenaan dengan itu, memang kedua lembaga ini memiliki dasar filosofi yang berbeda sekaligus melahirkan out put yang berbeda pula. Pada waktu itu muncullah perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum, maka muncullah sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum pada fase terakhir abad ke 19, serta dilanjutkan dan diperkuat abad 20.

Selain kondisi diatas, VOC dan Kolonial Belanda, melakukan usaha yang mempersempit ruang gerak pesantren

dan guru-guru Islam, dengan menetapkan ordonansi guru (1905), yaitu pesantren maupun guru harus memiliki izin kegiatannya. Dalam masalah pemberian danapun terjadi diskriminasi yang sangat mencolok, dibandingkan dengan dana untuk sekolah-sekolah agama Kristen Protestan. Jadi sangat kelihatan sikap kolonial Belanda yang tidak mendukung terhadap pendidikan Islam, tentunya sesuai dengan kebijakan mereka terhadap Islam. Sehingga memunculkan perlawanan dari umat Islam, seperti perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830). Perang Aceh (1873-1903).

## 2. Masa Kolonial Jepang (1942-1945).

Pada Pebruari 1942 Jepang menyerang Sumatera Selatan, selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda, (2) Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko/ Sekolah Rakyat*). Lama studi 6 tahun. Termasuk sekolah rakyat adalah Sekolah

Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan, terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.

Guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Pusat Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan *The Triple Movement* yang tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi PTR akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasihat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem *Nipponize* (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem *Nipponize* kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator

Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*; (2) *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olahraga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagi kebangsaan Jepang, *Kimigayo* setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, *Hinomura* dan menghormat Kaisar Jepang, *Tenno Heika* setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan *Dai Toa*, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan *Taiso*, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. (Dhofier, 1992b).

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: (1) Mengubah Kantor *Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim

Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk *Sumuka*; (2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang; (3) Mengizinkan pembentukan barisan *Hizbullah* yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin; (4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta; (4) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan. (Saputra, 2020).

Berdasarkan survei yang dilakukan *Shumubu* (Departemen Urusan Agama Pemerintahan Militer Jepang di Jawa tahun 1942, keberadaan lembaga pendidikan Islam dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 1.** Lembaga Pendidikan Islam pada pemerintahan militer Jepang tahun 1942

Data	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Penduduk pribumi	11. 039. 350		15. 040. 042	14. 811. 701
Pesantren dan madrasah	167	1.046	351	307
Ulama dan Pelajar	7. 652.		4. 466	6. 150.
	14. 573	69. 954	21. 957	32. 931

Sumber: Dhofier dalam Sekolah Al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia. (Dhofier, 1992a).

### **Lembaga Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan**

Pembahasan ini di bagi menjadi dua bagian yakni pendidikan Islam pada masa orde lama dan pada masa orde baru, penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama**

Setelah Republik Indonesia merdeka, pendidikan Islam pesantren dan madrasah mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah pada masa Orde Lama (1950 - 1966) diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pastilah sejarah mencatat bagaimana pemerintah Orde Lama memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Dalam salah satu nota *Islamic education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, tugas bagian pendidikan agama ada tiga, yaitu memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular, memberi pengetahuan umum di Madrasah, dan mengadakan Pendidikan Guru Agama

serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama dan kedua dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualistis, sedangkan tugas yang ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama itu sendiri. Berdasarkan keterangan di atas, ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan tinggi Islam. (Rahman, 2018).

#### a. Perkembangan Madrasah

Mempelajari perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Departemen Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Tentunya, tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Dalam rangka upaya meningkatkan madrasah maka pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan bantuan kepada madrasah dalam bentuk materil dan bimbingan, untuk itu Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. I Thn 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. I Thn 1946 dan disempurnakan dengan

Peraturan Menteri Agama No. 7 Thn 1952. (Kosim, 2007).

Di dalam peraturan tersebut dicantumkan bahwa yang dinamakan Madrasah adalah: Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Menurut ketentuan ini juga jenjang pendidikan madrasah terdiri dari:

- Madrasah Rendah, disebut Madrasah Ibtidaiyah.
- Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, disebut Madrasah Tsanawiyah.
- Madrasah Lanjutan Atas, disebut Madrasah Aliyah.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan: bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum. (Masykur, 2018).

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan

madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Dalam sejarah perkembangan madrasah tercatat pula bahwa pemerintah pernah mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) didirikan tahun 1958. MWB ini dimaksudkan oleh pemerintah sebagai usaha awal untuk bantuan dan pembinaan dalam rangka menyeragamkan kurikulum dan sistem penyelenggaraannya dengan madrasah-madrasah yang dikelola masyarakat. Madrasah ini lama belajarnya 8 tahun komposisi kurikulumnya 25% pelajaran agama dan 75% pelajaran umum (keterampilan dalam lapangan ekonomi, industri dan transmigrasi). (Asrohah, 1999). Tujuan dari madrasah ini adalah agar setamat dari madrasah anak didik kembali ke desa untuk berproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya dan keterampilan yang diperoleh selama 8 tahun di Madrasah. Dalam kenyataannya konsepsi MWB tidak berjalan sebagaimana yang diprogramkan, ada juga madrasah yang menamakan dirinya dengan MWB tapi kegiatannya tidak sesuai dengan kurikulum MWB.

#### b. Perkembangan Lembaga pendidikan tinggi Islam

Menurut Mahmud Yunus, *Islamic College* pertama telah didirikan 9 Desember 1940 di Padang, (Yunus, 1995). di bawah pimpinannya sendiri. Lembaga

tersebut terdiri dari dua fakultas, yaitu: Syariat/Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dengan PP No. 34 Thn 1950, dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN. (Rukiati & Himawati, 2006). Perkembangan lembaga pendidikan tinggi Islam sampai saat ini berkembang dengan pesat, membuka program pascasarjana, bahkan beberapa IAIN telah berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

#### 2. Lembaga Pendidikan Islam Era Orde Baru

##### a. Madrasah SKB Tiga Menteri

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975, bab I pasal I menyebutkan: "Yang dimaksud dengan Madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikam mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum".

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri 1975 terlihat, adanya perbedaan yang mendasar antara lulusan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum. Perbedaan tersebut ada dua hal. Pertama, di dalam kesempatan melanjutkan studi ke universitas umum negeri, alumni madrasah tidak memiliki kesempatan. Kedua, dari segi kesempatan kerja. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri, kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi alumni madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Departemen Agama atau lembaga – lembaga keagamaan saja. Tetapi dengan adanya SKB Tiga menteri Kesempatan terbuka sangat luas.

b. Madrasah Pasca Undang-Undang No. 2 THN 1989

Periode ini adalah periode dimana madrasah telah berada dibawah UU Sistem Pendidikan Nasional, dan diatur pula oleh PP No.28 dan 29. Berdasarkan

PP tersebut serta diikuti Surat Keputusan Menteri Agama No. 370 Thn 1993 tentang kurikulum MA dan Surat Keputusan No. 374 Thn 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum, dapat diketahui bahwa madrasah adalah Sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan dengan ini maka MIN, MTSN, dan MAN memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional, di tambah dengan ciri khas keIslamannya yang tertuang dalam kurikulum, yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih banyak dari sekolah umum.

Khusus mengenai Madrasah Aliyah Keagamaan perkembangannya hingga saat sekarang belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Data ini dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Statistik Madrasah Tingkat Dasar, Menengah Negeri, Swasta Tahun 1991 (Dhofier, 1992a)

No. Tingkat	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa		
		LK	PR	Total
I. Negeri				
1. MIN	442	73.588	79.266	15.2854
2. MTSN	452	128.618	159.767	28.8385
3. MAN	381	79.711		18.1601
Sub Total:	1275	281.917	340.923	622.840
II. Swasta				
1. MIS	21.320	1.254.988	1622.577	2.877.565
2. MTSS	6.329	332.007	437.699	2.769.706
3. MAS	2.027	89.804	97.762	3.187.566
4. Pesantren	6.795	625.529	1.004.210	1.629.739
5. Diniyah	16.680	1.120.670	1.358.902	2.479.572
Sub. Total: Negeri dan Swasta	53.151	3.422.998	4.521.150	7.944.148
	54.426	3.704.915	4.862.073	8.566.988

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa: Pendidikan agama khususnya Islam sejak zaman penjajahan Portugis, Spanyol, dan Belanda selalu dihalang-halangi, dimarjinalkan serta tidak diberi bantuan apapun oleh pihak penjajah dan dicurigai pihak penjajah sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan, sehingga madrasah selalu diawasi dan ditekan agar tidak berkembang dengan leluasa. Namun pada era penjajahan Jepang sedikit agak berbeda, Pendidikan madrasah di jaman Jepang sepertinya mendapat dukungan pihak Jepang karena Jepang ingin mengambil hati masyarakat pribumi dengan bersimpati dan memberi ruang gerak yang lebih baik untuk perkembangan agama Islam, sehingga para 'Ulama waktu itu berusaha mengembangkan pendidikan Islam melalui sarana pendidikan model Pesantren yang berbasisi pendidikan dasar dan menengah untuk memperdalam pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam pada masa Kemerdekaan terutama padamasa Orde Lama terfokus kedalam dua hal: Perkembangan dan peningkatan mutu madrasah sehingga diharapkan mampu sejajar dengan sekolah umum dan memperluas jangkauan pengajaran agama, tidak terbatas pada madrasah, tetapi menjangkau sekolah umum bahkan perguruan tinggi umum. Kedua hal ini terkait erat dengan upaya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama melakukan konvergensi dualisme

pendidikan yang telah tumbuh sejak masa kolonial. Sistem pendidikan agama dirasa semakin mempunyai peran yang luas di masa orde baru sehingga kurikulum pendidikan agama diperluas dan tidak melulu mengajarkan pendidikan agama semata, malah dengan kebijaksanaan pemerintah melalui kebijakan SKB 3 menteri kurikulum pendidikan madrasah diformat menjadi dua model. Yang satu berorientasi pada pendidikan Islam sehingga kurikulum pendidikan Islam dibuat 70 % dan pendidikan umum hanya 30 %, dan sebaliknya model yang kedua yaitu kurikulum pendidikan agama hanya 30 % saja, sementara kurikulum pendidikan umum 70 %.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta. Logos.
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 14.
- Dalimunthe, R. A. (2021). Pesantren: Dinamika dan Perkembangan. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 11–19. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/23>
- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan eksistensi: Pesantren sekolah dan madrasah*. Tiara Wacana Yogya.
- Daulay, H. P. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya*. Prenada Media.

- Daulay, H. P., & Tobroni, T. (2017). Islamic Education in Indonesia: A Historical Analysis of Development and Dynamics. *British Journal of Education*, 5(13), 109–126.
- Dhofier, Z. (1992a). Sekolah Al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 3(4).
- Dhofier, Z. (1992b). The intellectualization of Islamic studies in Indonesia. *Indonesia Circle*, 20(58), 19–31.
- Dobbin, C. E. (1992). *Kebangkitan Islam dalam ekonomi petani yang sedang berubah: Sumatra Tengah, 1784-1847*. Inis.
- Harahap, R. M. (2019). Pendidikan dan peradaban dalam narasi sejarah Islam klasik: korelasi dan koneksi. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Hasjmy, A. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. Monash University.
- Huda, N. (2015). Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia Sampai Awal Abad XX. *Addin*, 9(2).
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan perkembangan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Maghfuri, A., & Rasmuin, R. (2019). Dinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad Ke 20 (Analisis Historis Implementasi Kurikulum Madrasah). *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1–16.
- Masykur, M. R. (2018). Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia. *Jurnal Al-Makrifat Vol*, 3(2).
- Nasution, S. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jemmars.
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–14.
- Rukiati, E. K., & Himawati, F. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Saputra, F. (2020). Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 98–108.
- Yatim, B. (2016). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus, M. (1995). *Sejarah pendidikan di Indonesia*. Mutiara.